



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Dr. Sutomo No. 53 Blitar Telp/Fax (0342) 801243

# PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

P-RENJA TAHUN 2025



[bakesbangpol@blitarkab.go.id](mailto:bakesbangpol@blitarkab.go.id)

[www.bakesbangpol.blitarkab.go.id](http://www.bakesbangpol.blitarkab.go.id)



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, maka Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Tahun 2025 dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar telah selesai kami susun.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Tahun 2025 merupakan arah pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2025 bagi Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Blitar sebagai penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021– 2026.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Tahun 2025 ini mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021– 2026 yang telah dibuat yang dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan setiap tahun. Sehingga dapat berlanjut dan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi daerah, dan untuk mencari solusi pemecahan dalam menghadapi berbagai masalah aktual.

Dengan telah tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Tahun 2025 ini diharapkan dapat terealisasi sehingga kinerja tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar dapat berjalan dengan baik, sesuai harapan dalam mengemban Visi dan Misi untuk mewujudkan Kabupaten Blitar yang lebih baik dari tahun – tahun sebelumnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Tahun 2025 ini semoga bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Blitar dan Jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan

Blitar, 10 Juli 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BLITAR



I. SETIYANA, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 196808101997031003

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, maka Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Tahun 2025 dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar telah selesai kami susun.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Tahun 2025 merupakan arah pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2025 bagi Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Blitar sebagai penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021– 2026.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Tahun 2025 ini mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021– 2026 yang telah dibuat yang dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan setiap tahun. Sehingga dapat berlanjut dan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi daerah, dan untuk mencari solusi pemecahan dalam menghadapi berbagai masalah aktual.

Dengan telah tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Tahun 2025 ini diharapkan dapat terealisasi sehingga kinerja tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar dapat berjalan dengan baik, sesuai harapan dalam mengemban Visi dan Misi untuk mewujudkan Kabupaten Blitar yang lebih baik dari tahun – tahun sebelumnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Tahun 2025 ini semoga bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Blitar dan Jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan

Blitar, 10 Juli 2025  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BLITAR

Ir. SETIYANA, MM.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196808101997031003

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025.....</b>	<b>8</b>
2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Renja OPD .....	8
2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	10
2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.....	15
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>42</b>
3.1 Rencana Kerja .....	42
3.2 Pendanaan .....	46
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>52</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan jangka pendek tahunan, dalam rangka merealisasikan target kinerja tahun 2025 dan merupakan bagian dari rencana kerja pemerintah daerah. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Tahun 2024 memuat kerangka kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, sasaran, uraian program kegiatan serta rencana indikatif pendanaannya yang hendak dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar dalam mengemban visi dan misi yang mengacu pada :

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar tahun 2021 – 2026;
- Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar tahun 2021 – 2016;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 – 3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5589 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Perubahan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2025

Dalam rangka menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Tahun 2025 harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026. Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Tahun 2024 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar diharapkan dapat memberikan kontribusi aktif dalam pelaksanaan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2025.

Dalam prosesnya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Tahun 2025 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Perubahan Tahun 2025. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Rencana

Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Tahun 2024 dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan :

1. Substansi Rancangan Akhir Renja PD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Awal Renja PD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja PD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

## 1.2 Landasan Hukum Penyusunan

Beberapa landasan hukum yang mengatur dan menjadi pedoman dalam proses penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2025 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
  15. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah 10/E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 82);
19. Peraturan Bupati Blitar Nomor 125 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar;
20. Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
21. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD TA 2025;
22. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD TA 2025;
23. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD TA 2025;
24. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud :**

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rankhir Renja PD) Tahun 2025 adalah untuk meningkatkan stabilitas IPOLEKSOSBUD (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya) di Kabupaten Blitar dan sebagai penyesuaian terhadap perubahan asumsi makro, kondisi dan kapasitas fiskal, serta kebijakan pada tahun berjalan sesuai dengan tema RKPD Perubahan Kabupaten Blitar 2025 yaitu "Penguatan SDM Unggul dan Ekosistem Lokal untuk Kemandirian Ekonomi Daerah yang Inklusif", serta sebagai bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

#### **1.3.2. Tujuan :**

Tujuan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rankhir Renja PD) Tahun 2025 sebagai berikut :

- Agar tercipta integrasi, sinkronisasi dan sinergi program kegiatan dalam mewujudkan visi, misi yang telah dirumuskan sesuai Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar 2021 – 2026;
- Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan;
- Agar tercapai sumber daya secara efektif dan efisien yang berkelanjutan;
- Pelaksanaan kegiatan mandatori baru sebagai akibat dari perubahan Undang-Undang.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Secara garis besar sistematika penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rancangan Renja PD) Tahun 2025 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan Renja

#### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025**

##### **2.1. Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan.

##### **2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis terkait dengan pelayanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas fungsi, tantangan, peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

##### **2.3. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun berjalan sampai dengan triwulan II dengan mengacu pada APBD Tahun

2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

### **BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD**

Berisi faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan , antara lain mengenai jumlah program dan jumlah kegiatan, sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan, kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya, rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai Ranwal RKPD dan dituangkan dalam Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan.

### **BAB IV. PENUTUP**

Berisikan uraian penutup berupa :

- a. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD**  
**SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025**

**2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Renja OPD**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar dalam kurun tahun 2021 - 2026 menetapkan tujuan sebagai berikut : **“Penguatan karakter Pancasila melalui kesalehan sosial untuk mewujudkan stabilitas wilayah di bidang IPOLEKSOSBUD (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya)”**. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar dalam kurun waktu tahun 2021 - 2026, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya indeks kesalehan sosial melalui fasilitasi lembaga kesatuan bangsa
2. Meningkatnya penanganan konflik sosial di masyarakat
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat melalui penguatan infrastruktur demokrasi
4. Meningkatnya akuntabilitas pada Bakesbangpol Kabupaten Blitar

**Tabel 2. 1 Pencapaian Kinerja s.d Triwulan II Pelayanan PD**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025**

NO.	SASARAN RENSTRA OPD	URAIAN INDIKATOR	TRIWULAN II TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya indeks kesalehan sosial melalui fasilitasi lembaga kesatuan bangsa	Indeks Kesalehan Sosial	88	_*1)	_*1)
2	Meningkatnya penanganan konflik sosial di masyarakat	Tingkat penanganan konflik sosial di masyarakat	95%	45%	47,3%
3	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat melalui penguatan infrastruktur demokrasi	Tingkat fasilitasi penguatan infrastruktur demokrasi	80%	40%	50%
4.	Meningkatnya akuntabilitas pada Bakesbangpol Kab. Blitar	Nilai SAKIP pada Bakesbangpol Kab.Blitar	B (66,55)	^-2)	^-2)

*Keterangan :*

- 1) Hasil Indeks Kesalehan Sosial akan dirilis pada akhir tahun;
- 2) Belum dilaksanakan penilaian LKE SAKIP oleh Inspektorat.

Dalam hal ini pelayanan publik yang diberikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kepada masyarakat adalah mewujudkan stabilitas wilayah melalui pencegahan dan penanganan konflik sosial yang terjadi pada masyarakat. Konflik sosial tersebut meliputi, pengendalian demonstrasi di bidang Ideologi Politik sosial dan budaya. Pengendalian konflik dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui program kegiatan:

- Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
- Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Masyarakat
- Program Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Fasillitasi Penanganan Konflik Sosial.

Sebagai lembaga pemerintah yang mengemban tugas pokok dan fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik maka peningkatan kesadaran berpolitik masyarakat perlu ditingkatkan dan hal ini dilaksanakan Bakesbangpol sebagai indikator sasaran OPD yang kedua yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dengan penguatan infrastruktur demokrasi. Adapun infrastruktur demokrasi yang dimaksud adalah pembinaan terhadap partai politik, organisasi masyarakat, pendidikan politik dan kerjasama antara lembaga penyelenggara pemilu. Karena keberhasilan dari program ini adalah peningkatan kesadaran masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya saat pemilu.

Dalam pengukuran standart minimal dan Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Blitar, Bakesbangpol tidak mengampu kedua indikator tersebut. Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar mengampu Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kesalehan Sosial bersama Perangkat Daerah Urusan Trantibum Linmas, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Perangkat Daerah yang menangani Urusan Data dan Statistik dan Kecamatan. Dalam hal penghitungan Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2024, Bakesbangpol Kabupaten Blitar berperan sebagai sumber data, sementara untuk kegiatan penghitungannya berada pada Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar. Adapun capaian Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 2. 2 Target dan Realisasi Indikator Kesalehan Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2021 s.d 2024**

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	82 (Sangat Tinggi)	84,09 (Sangat Tinggi)	84* (Sangat Tinggi)	84,23 (Sangat Tinggi)	86 (Sangat Tinggi)	84,61 (Sangat Tinggi)

\*Keterangan : Target sesuai dengan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021 - 2026

Pada tahun 2024 terjadi penurunan capaian kinerja pada indikator Indeks Kesalehan Sosial. Pada indikator Indeks Kesalehan Sosial dari target tahun 2024 sebesar 86 terealisasi sebesar 84,61 atau dengan capaian sebesar 98,3%. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan responden dari sasaran tokoh agama dan tokoh masyarakat ditambah tokoh organisasi masyarakat, FKUB, dan FPK, sehingga Indeks Kesalehan Sosial benar-benar mencerminkan kondisi riil dari 4 (empat) dimensi yang diteliti.

## **2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

### **A. Tingkat Kinerja Pelayanan PD**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Bakesbangpol sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah mengemban tugas melakukan pelayanan di Bidang peningkatan Stabilitas daerah di bidang ekonomi, sosial, budaya. Dalam hal ini adalah pelayanan di Bakesbangpol diimplementasikan dalam bentuk:

1. Sosialisasi di bidang peningkatan pemantapan di bidang ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, Bela Negara, pembinaan karakter bangsa dalam bhineka tunggal ika, menjaga pembauran suku bangsa dan sejarah kebangsaan.
2. Menjaga stabilitas politik melalui pendidikan politik, mengembangkan etika politik serta budaya politik terutama untuk partai politik dan organisasi masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam percepatan pembangunan

3. Peningkatan pemberdayaan organisasi masyarakat melalui pembinaan kelembagaan dan organisasi masyarakat, fasilitasi sengketa ormas dan pendidikan kelembagaan bagi ormas
4. Pembinaan dan pengembangan ekonomi, sosial dan budaya terutama dalam pencegahan peredaran narkoba, pembinaan Forum kerukunan umat Beragama dan penghayat kepercayaan
5. Peningkatan stabilitas keamanan melalui peningkatan kewaspadaan dini masyarakat, kerjasama intelegen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, dan fasilitasi penanganan konflik sosial

Dalam pelaksanaan pelayanan, bentuk pelayanan yang disediakan oleh Bakesbangpol memang tidak langsung menyentuh kepada masyarakat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Tapi bila suatu wilayah tidak memiliki pondasi yang kuat akan stabilitas di bidang ekonomi, sosial dan budaya maka kegiatan lainnya akan hancur. Sebagai contoh yang sering terjadi manakala suatu OPD di demo oleh masyarakat maka OPD tersebut tidak bisa melaksanakan kegiatan lain dengan optimal. Begitu juga bila terjadi konflik sosial di masyarakat, penggunaan sosial media dengan informasi yang dapat diakses tanpa batas akan menimbulkan kerawanan akibat perbedaan persepsi, yang akan berdampak pada konflik sosial.

## **B. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi**

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh bakesbangpol dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya merupakan hambatan klasik yang dihadapi oleh setiap OPD yang terdiri dari hambatan dan permasalahan internal dan eksternal.

Hambatan internal antara lain adalah:

- 1) Kemampuan sumberdaya manusia: tuntutan untuk profesional dalam pelaksanaan pekerjaan tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan pelatihan dan dukungan anggaran. Selain itu jabatan fungsional hasil penyetaraan memaksakan setiap individu harus berubah total dalam budaya pekerjaan dengan tuntutan profesionalitas tidak dilengkapi dengan peta jenjang karir yang dapat diikuti.
- 2) Ketersediaan sarana dan prasana: keterbatasan sarana dan prasarana terutama dalam hal pemenuhan informasi Teknologi beserta pelatihan

penggunaannya menyebabkan beberapa kegiatan mengalami keterlambatan dalam pengambilan kebijakan terutama untuk masalah intelegen yang membutuhkan keputusan pengambilan kebijakan strategis yang cepat

- 3) Ketersediaan anggaran: karena perubahan factor-faktor pendukung kegiatan yang sangat cepat dan tidak dapat diprediksi menyebabkan anggaran juga menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi sehingga kegiatan kadang tidak dapat dicapai secara optimal.
- 4) Regulasi: perubahan regulasi yang menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat menyebabkan perlunya penyesuaian di beberapa pasal yang tidak dibarengi dengan sosialisasi menyebabkan interpretasi setiap yang membaca berbeda-beda.

### **C. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Capaian Program Nasional dan SDGs**

#### **1) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah**

Dalam pencapaian visi Kabupaten Blitar periode 2025 - 2029 untuk mewujudkan Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung Misi IV yaitu “Menjamin Ketentraman, Ketertiban Serta Kebebasan Beragama Dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Pelaksanaan Pembangunan”. Sebagai upaya untuk mencapai Misi IV, maka tujuan pembangunan adalah “Terciptanya Suasana Kehidupan yang Aman dan Kondusif”, yang dibentuk dari sasaran pembangunan “Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Kebebasan Beragama”.

Sesuai tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar mendukung sasaran tujuan dan sasaran pembangunan Misi IV dengan indikator Indeks Kesalehan Sosial, dimana tujuan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar adalah Mewujudkan stabilitas di bidang politik dan kesatuan bangsa di daerah.

Sebagai upaya mewujudkan stabilitas di bidang politik dan kesatuan bangsa di daerah dilaksanakan melalui fasilitasi Forum Pembauran kebangsaan (FPK) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Kegiatan ini diukur dengan IKS (Indeks Kesalehan Sosial) dengan capaian sebagai berikut:

**Tabel 2. 3** Target dan Capaian Indeks Kesalehan Sosial

No	Tahun							
	2022		2023		2024		2025	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Nilai IKS	82	84.09	84	84.23	86	84,61	88	....*)

\*) Hasil Indeks Kesalehan Sosial akan dirilis pada akhir tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mewujudkan Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya yang menjadi visi dan misi Bupati Blitar dengan indikator kinerja Indeks Kesalehan Sosial setiap tahun meningkat, ini dapat dibuktikan bahwa ketaatan masyarakat dalam pelaksanaan kerukunan umat beragama dan penyelesaian dalam masalah keagamaan serta masalah pembauran suku dan etnis di Kabupaten Blitar tidak sampai menyinggung pada stabilitas keamanan daerah.

## 2) Capaian Program Nasional

Angka partisipasi masyarakat dalam pemilu mencerminkan kesadaran masyarakat dalam menyalurkan hak politisnya kepada Negara. Adapun angka partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu tahun ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 4 Capaian Program Nasional**

Target nasional	Kabupaten blitar	
	Target	Realisasi
81.48	80	81,68

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target pencapaian realisasi partisipasi pemilu meningkat dari target yang ditetapkan, ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi semakin baik.

Bakesbangpol Kabupaten Blitar menyusun program dan kegiatan yang dituangkan pada Rencana Kerja Bakesbangpol Kabupaten Blitar berdasarkan isu-isu terkini dan SDG's sektor menjaga perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat. Sektor menjaga stabilitas keamanan pada SDGs tersebut adalah : Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level.

#### **D. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD**

Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan di Bakesbangpol dalam meningkatkan stabilitas di bidang ekonomi sosial dan budaya adalah:

- 1) Peningkatan karakter bangsa melalui peningkatan sosialisasi wawasan kebangsaan melalui pendidikan wawasan Kebangsaan, fasilitasi kegiatan pembauran Kebangsaan, penanaman nilai- nilai sejarah bangsa melalui PHBN, dan pembinaan Paskibraka.
- 2) Peningkatan peran partai politik sebagai mitra pemerintah dalam percepatan pembangunan melalui Pendidikan politik, pengembangan etika politik dan budaya politik, pemantauan situasi politik, serta penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang aman, tertib, jujur dan adil.
- 3) Pembinaan organisasi masyarakat melalui pemberdayaan kelembagaan ormas, penyaluran hibah ormas, pengawasan ormas dan fasilitasi sengketa ormas
- 4) Peningkatan ketahanan ekonomi sosial dan budaya melalui sosialisasi P4GN, fasilitasi kegiatan FKUB dan pemantauan kegiatan penghayat kepercayaan , dukungan desa bersinar (desa bersih narkoba)
- 5) Peningkatan kewaspadaan dini masyarakat untuk pencegahan konflik sosial melalui peningkatan eksistensi FKDM, Wasdin, Forkopimda, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, ormas asing serta kerjasama intelijen.

#### **E. Isu – Isu Penting**

Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Kurangnya pemahaman tentang wawasan kebangsaan sehingga mengakibatkan lemahnya semangat persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat seiring dengan perkembangan dinamika kehidupan masyarakat serta arus globalisasi khususnya di bidang teknologi, informasi, budaya dan ekonomi memunculkan ekses-ekses negatif dengan munculnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi, masih sering terjadi perselisihan antar warga terkait pendirian rumah ibadah, redistribusi tanah eks perkebunan/tanah kawasan hutan.

- c. Pendidikan politik masyarakat yang masih rendah sebagaimana dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu yang cenderung menurun.
- d. Efek dari informasi sosial media menyebabkan munculnya kelompok – kelompok tertentu dengan paham – paham yang terkadang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945
- e. Ancaman penyalahgunaan obat – obatan terlarang memerlukan perhatian khusus karena sudah merambah ke seluruh lapisan masyarakat
- f. Efek domino dari kemajuan teknologi adalah perang kepentingan untuk perebutan sumber daya, informasi dan pasar, sehingga menimbulkan proxy war.

### **2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2025**

Evaluasi pelaksanaan anggaran dan bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjad bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Evaluasi tribulan II pada Bakesbangpol tertuang dalam Tabel 2.3

**Formulir E.81**  
**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Blitar**  
**Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Blitar**  
**Periode Pelaksanaan 2025**

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Blitar yang mengacu pada sasaran RKPD

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp	
				8	9	10	11	12	13=(12/7)*100%		14=6+12		15=(14/5)*100% Rp=14			16											
1	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	90	3.380.503.014,00	90	3.222.977.392,00	90	3.608.712.190,00	20	722.076.877,00	40	1.005.860.632,00	0,00	0,00	40	1.727.937.509,00	44,44	47,88	40	4.950.914.901,00	44,44	44,44	4.950.914.901,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
2	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	90	15.999.484,00	90	15.999.200,00	90	6.854.200,00	20	1.010.000,00	40	1.010.000,00	0,00	0,00	40	2.020.000,00	44,44	29,47	40	18.019.200,00	44,44	112,62	18.019.200,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
3	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	15.999.484,00	3	15.999.200,00	3	6.854.200,00	1	1.010.000,00	2	1.010.000,00	0,00	0,00	2	2.020.000,00	66,67	29,47	2	18.019.200,00	66,67	112,62	18.019.200,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
4	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	90	2.503.321.165,00	90	2.380.119.177,00	90	2.644.656.466,00	20	464.818.425,00	40	800.180.488,00	0,00	0,00	40	1.264.998.913,00	44,44	47,83	40	3.645.118.090,00	44,44	145,61	3.645.118.090,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
5	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17	2.459.088.265,00	17	2.337.667.627,00	23	2.602.466.466,00	23	457.538.425,00	23	785.383.488,00	0,00	0,00	23	1.242.921.913,00	117,65	47,76	20,00	3.580.589.540,00	117,65	145,61	3.580.589.540,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
6	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3	33.072.960,00	3	31.292.350,00	3	26.910.000,00	1	7.280.000,00	2	9.155.000,00	0,00	0,00	2	16.435.000,00	66,67	61,07	2	47.727.350,00	66,67	144,31	47.727.350,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
7	8.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3	11.159.940,00	3	11.159.200,00	3	15.280.000,00	0,00	1	5.642.000,00	0,00	0,00	1	5.642.000,00	33,33	36,92	1	16.801.200,00	33,33	150,55	16.801.200,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100%		14=6+12		15=(14/5)*100% Rp=14			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp	
8	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90	12.511.412,00	90	12.430.150,00	90	41.726.200,00																		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9	8.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3	8.151.840,00	3	8.151.050,00	3	14.151.000,00																		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	4.359.572,00	3	4.279.100,00	5	27.575.200,00																		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
11	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	90	405.835.205,00	90	393.250.188,00	90	528.363.108,00	20	195.313.298,00	40	83.740.336,00	0,00	0,00	40	279.053.634,00	44,44	52,81	40	672.303.822,00	44,44	165,66	672.303.822,00			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
12	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	170.909.705,00	4	158.357.788,00	4	180.334.942,00	1	14.982.048,00	2	54.731.336,00	0,00	0,00	2	69.713.384,00	50,00	38,66	2	228.071.172,00	50,00	133,45	228.071.172,00			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
13	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11	234.925.500,00	11	234.892.400,00	11	348.028.166,00	3	180.331.250,00	6	29.009.000,00	0,00	0,00	6	209.340.250,00	54,55	60,15	6	444.232.650,00	54,55	189,10	444.232.650,00			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
14	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	90	372.776.984,00	90	354.221.877,00	90	344.567.216,00	20	56.613.154,00	40	106.742.308,00	0,00	0,00	40	163.355.462,00	44,44	47,41	40	517.577.339,00	44,44	138,84	517.577.339,00			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
15	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10	372.776.984,00	10	354.221.877,00	12	344.567.216,00	12	56.613.154,00	12	106.742.308,00	0,00	0,00	12	163.355.462,00	110,00	47,41	110,00	517.577.339,00	110,00	138,84	517.577.339,00			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	90	70.058.764,00	90	66.956.800,00	90	42.545.000,00	20	4.322.000,00	40	9.940.000,00	0,00	0,00	40	14.262.000,00	44,44	33,52	40	81.218.800,00	44,44	115,93	81.218.800,00			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025				Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100%		14=6+12				15=(14/5)*100% Rp=14			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp			
17	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	29	70.058.764,00	29	66.956.800,00	29	42.545.000,00	3	4.322.000,00	9	9.940.000,00	0,00	0,00	9	14.262.000,00	31,03	33,52	9	81.218.800,00	31,03	115,93	81.218.800,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
18	8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kebijakan Teknis dan pemantapan yang Menangani Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan	90	993.769.999,00	80	993.073.728,00	85	1.482.417.999,00	15	146.345.000,00	35	141.804.000,00	0,00	0,00	35	288.149.000,00	38,89	19,44	35	1.281.222.728,00	38,89	38,89	1.281.222.728,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
19	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase kebijakan teknis yang dihasilkan dan kegiatan pemantapan ideologi Pancasila dan karakter bangsa yang dilaksanakan Presentase perumusan kebijakan teknis dan kegiatan pemantapan ideologi Pancasila dan karakter bangsa yang dilaksanakan	90 90	993.769.999,00	80 80	993.073.728,00	85 85	1.482.417.999,00	15 15	146.345.000,00	35 35	141.804.000,00	0 0	0,00 0,00	35 35	288.149.000,00	38,89	19,44	35 35	1.281.222.728,00	38,89 38,89	128,93	1.281.222.728,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
20	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	450	273.103.297,00	450	272.643.912,00	450	460.221.400,00	25	0,00	150	104.554.000,00	0,00	0,00	150	104.554.000,00	33,33	22,72	150	377.197.912,00	33,33	138,12	377.197.912,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
21	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4	3.600.000,00	4	3.600.000,00	4	9.716.200,00	1	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	50,00	0,00	2	3.600.000,00	50,00	100,00	3.600.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025				Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100%		14=6+12				15=(14/5)*100% Rp=14			16
22	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	4	24.562.992,00	4	24.462.800,00	4	227.161.999,00	1	146.345.000,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	146.345.000,00	50,00	64,42	2	170.807.800,00	50,00	695,39	170.807.800,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
23	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	72	692.503.710,00	72	692.367.016,00	78	785.318.400,00		0,00	78	37.250.000,00	0,00	0,00	0,00	78	37.250.000,00	108,33	4,74	78	729.617.016,00	108,33	105,36	729.617.016,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
24	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat kehadiran masyarakat dalam pemilu dan/atau pilukada	80	57.625.657.986,00	80	57.595.191.050,00	80	2.246.640.000,00	20	10.198.500,00	40	2.092.848.000,00	0,00	0,00	0,00	40	2.103.046.500,00	50,00	93,61	40	59.698.237.550,00	50,00	50,00	59.698.237.550,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
25	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik	80	57.625.657.986,00	80	57.595.191.050,00	80	2.246.640.000,00	20	10.198.500,00	40	2.092.848.000,00	0,00	0,00	0,00	40	2.103.046.500,00	50,00	93,61	40	59.698.237.550,00	50,00	103,60	59.698.237.550,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
26	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	225	64.206.097,00	225	58.843.650,00	225	132.303.600,00	25	6.368.500,00	75	16.158.000,00	0,00	0,00	0,00	75	22.526.500,00	33,33	17,03	75	81.370.150,00	33,33	126,73	81.370.150,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025				Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100%		14=6+12				15=(14/5)*100% Rp=14			16
27	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	9	57.561.451.889,00	9	57.536.347.400,00	8	2.114.336.400,00	2	3.830.000,00	4	2.076.690.000,00	0,00	0,00	4	2.080.520.000,00	44,44	98,40	4	59.616.867.400,00	44,44	103,57	59.616.867.400,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
28	8.01.04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	27	2.745.002.232,00	27	2.715.413.000,00	27	3.528.270.581,00	7	132.256.000,00	17	2.492.882.000,00	0,00	0,00	17	2.625.138.000,00	62,96	74,40	17	5.340.551.000,00	62,96	62,96	5.340.551.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
29	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang dibina	27	2.745.002.232,00	27	2.715.413.000,00	27	3.528.270.581,00	7	132.256.000,00	17	2.492.882.000,00	0,00	0,00	17	2.625.138.000,00	62,96	74,40	17	5.340.551.000,00	62,96	194,56	5.340.551.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
30	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	115	18.900.000,00	115	18.893.600,00	65	52.512.581,00	25	0,00	0,00	0,00	0,00	25	0,00	21,74	0,00	25	18.893.600,00	21,74	99,97	18.893.600,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
31	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	10	2.726.102.232,00	10	2.696.519.400,00	10	3.475.758.000,00	2	132.256.000,00	6	2.492.882.000,00	0,00	0,00	6	2.625.138.000,00	60,00	75,53	6	5.321.657.400,00	60,00	195,21	5.321.657.400,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025			Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100%		14=6+12			15=(14/5)*100% Rp=14			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp		
32	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya yang dilaksanakan	87	49.997.768,00	84	49.964.600,00	85	115.291.050,00	0,00	25	0,00	0,00	0,00	25	0,00	28,74	0,00	25	49.964.600,00	28,74	28,74	49.964.600,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
33	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dihasilkan	87	49.997.768,00	84	49.964.600,00	85	115.291.050,00	0,00	25	0,00	0,00	0,00	25	0,00	28,74	0,00	25	49.964.600,00	28,74	99,93	49.964.600,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
34	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	225	45.677.088,00	225	45.644.600,00	225	113.491.550,00	0,00	25	0,00	0,00	0,00	25	0,00	11,11	0,00	25	45.644.600,00	11,11	99,93	45.644.600,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
35	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3	4.320.680,00	3	4.320.000,00	3	1.799.500,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	33,33	0,00	1	4.320.000,00	33,33	99,98	4.320.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
36	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Tingkat Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat	95	1.126.598.500,00	90	1.061.220.500,00	95	1.587.893.046,00	10	31.245.000,00	45	427.015.000,00	0,00	0,00	45	458.260.000,00	47,37	28,86	45	1.519.480.500,00	47,37	47,37	1.519.480.500,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025				Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100%		14=6+12				15=(14/5)*100% Rp=14			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp			
37	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase kegiatan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	95	1.126.598.500,00	90	1.061.220.500,00	95	1.587.893.046,00	10	31.245.000,00	45	427.015.000,00	0,00	0,00	45	458.260.000,00	47,37	28,86	45	1.519.480.500,00	47,37	134,87	1.519.480.500,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
38	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	185	196.838.000,00	185	178.698.000,00	185	437.448.000,00	25	15.790.000,00	85	209.710.000,00	0,00	0,00	85	225.500.000,00	45,95	51,55	85	404.198.000,00	45,95	205,35	404.198.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
39	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8	50.664.000,00	8	50.664.000,00	8	66.560.000,00	2	10.240.000,00	4	16.000.000,00	0,00	0,00	4	26.240.000,00	50,00	39,42	4	76.904.000,00	50,00	151,79	76.904.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
40	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4	879.096.500,00	4	831.858.500,00	4	1.083.885.046,00	1	5.215.000,00	2	201.305.000,00	0,00	0,00	2	206.520.000,00	50,00	19,05	2	1.038.378.500,00	50,00	118,12	1.038.378.500,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
<b>TOTAL</b>					<b>65.921.529.499,00</b>		<b>65.637.840.270,00</b>		<b>12.569.224.866,00</b>		<b>1.042.121.377,00</b>		<b>6.160.409.632,00</b>		<b>0,00</b>		<b>7.202.531.009,00</b>		<b>264,19</b>		<b>72.840.371.279,00</b>			<b>72.840.371.279,00</b>					
Rata-rata Capaian Kinerja Program																					45,40%	134,72%							
Predikat Kinerja Program																					Sangat Rendah	Sangat Tinggi							

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100%		14=6+12		15=(14/5)*100% Rp=14			16
<p>Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :</p> <p><b>8.01.0.00.0.00.01.0000. 8.01.02. PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>  Dukungan dan kerjasama antar lembaga kesatuan bangsa</p> <p><b>8.01.0.00.0.00.01.0000. 8.01.03. PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>  Sinergitas antara Pemerintah, lembaga politik dan lembaga penyelenggara pemilu</p> <p><b>8.01.0.00.0.00.01.0000. 8.01.04. PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>  Sinergitas antara pihak yang menyalurkan hibah dana yang menerima hibah dengan komunikasi yang baik</p> <p><b>8.01.0.00.0.00.01.0000. 8.01.05. PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>  Kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan</p> <p><b>8.01.0.00.0.00.01.0000. 8.01.06. PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</b>  Kerjasama dan komunikasi yang sangat baik dengan jajaran samping</p> <p><b>8.01.0.00.0.00.01.0000. 8.01.01. PROGRAM Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>  Komitmen dalam menjalankan tugas sesuai dengan perencanaan</p>																											
<p>Faktor Penghambat pencapaian Kinerja :</p> <p><b>8.01.0.00.0.00.01.0000. 8.01.02. PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>  Perbedaan pendapat dan persepsi dalam menterjemahkan suatu kebijakan dan surat sering terjadi</p> <p><b>8.01.0.00.0.00.01.0000. 8.01.03. PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>  Kurang koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan</p> <p><b>8.01.0.00.0.00.01.0000. 8.01.04. PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>  SDM yang dimiliki setiap ormas berbeda-beda latar belakang pendidikan sehingga dalam menginterpretasikan sebuah dokumen juga berbeda</p> <p><b>8.01.0.00.0.00.01.0000. 8.01.05. PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>  Sasaran kegiatan yang berbeda-beda menyebabkan kesulitan dalam menginterpretasikan kebijakan</p> <p><b>8.01.0.00.0.00.01.0000. 8.01.06. PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</b>  Latar belakang antara sipil dan tentara nasional mengakibatkan kerjasama intelegen tidak terlalu dalam</p> <p><b>8.01.0.00.0.00.01.0000. 8.01.01. PROGRAM Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>  Kurang koordinasi dan komunikasi antar bidang</p>																											
<p>Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :</p> <p><b>8.01.0.00.0.00.01.0000. 8.01.02. PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>  Melakukan koordinasi dan sinkronisasi semua pihak</p> <p><b>8.01.0.00.0.00.01.0000. 8.01.03. PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>  Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan</p> <p><b>8.01.0.00.0.00.01.0000. 8.01.04. PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>  Bimbingan kepada ormas dalam mengelola hibah yang disalurkan dan pertanggungjawaban penggunaannya</p> <p><b>8.01.0.00.0.00.01.0000. 8.01.05. PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>  Meningkatkan kerjasama dan komunikasi dengan pihak terkait</p> <p><b>8.01.0.00.0.00.01.0000. 8.01.06. PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</b>  Peningkatan kerjasama dan komunikasi dalam stabilitas wilayah terutama dalam pengamanan menjelang pemilu</p> <p><b>8.01.0.00.0.00.01.0000. 8.01.01. PROGRAM Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>  Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar bidang</p>																											
<p>Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :</p> <p><b>8.01.0.00.0.00.01.0000. 8.01.02. PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>  Melakukan koordinasi dan sinkronisasi antara lembaga pemerintah, pendidikan, lembaga kesatuan bangsa, tokoh masyarakat dan media dalam dukungan pelaksanaan kegiatan</p> <p><b>8.01.0.00.0.00.01.0000. 8.01.03. PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>  Peningkatan komunikasi politik antara pemerintah, masyarakat dan penyelenggara pemilu</p> <p><b>8.01.0.00.0.00.01.0000. 8.01.04. PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>  Peningkatan pengawasan dan pemberdayaan ormas sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p> <p><b>8.01.0.00.0.00.01.0000. 8.01.05. PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>  Meningkatkan kerjasama dan komunikasi dengan pihak terkait</p> <p><b>8.01.0.00.0.00.01.0000. 8.01.06. PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</b>  Peningkatan kerjasama untuk stabilitas politik</p> <p><b>8.01.0.00.0.00.01.0000. 8.01.01. PROGRAM Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>  Update data untuk perencanaan</p>																											

BLITAR,  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar



Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Bulan Juni 2025 sebagai berikut :

Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 12,569,224,866 ,- (Dua belas milyar lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) dan hingga triwulan II tahun 2025 terealisasi sebesar Rp. 7,202,531,009,- (Tujuh milyar dua ratus dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan rupiah) atau 57,30% yang dijabarkan melalui 6 Program 11 kegiatan dan 23 sub kegiatan sebagai berikut :

#### **A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Program ini merupakan program yang mendukung aktivitas perkantoran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar. Pada program ini terdapat 6 kegiatan dan 10 sub kegiatan sebagai berikut :

##### **1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Tertib administrasi dan dokumen merupakan syarat wajib untuk penyediaan data atau informasi perencanaan kegiatan. Untuk itu dokumen perencanaan diperlukan untuk evaluasi apakah program kegiatan dapat dicapai dan tepat sasaran. Pada kegiatan ini terdapat 1 sub kegiatan sebagai berikut :

dengan sub kegiatan sebagai berikut:

##### **a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**

Meliputi kegiatan :

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan (Penyusunan Renstra, Renja, Renja Perubahan, Perjanjian Kinerja)
- 2) Penyusunan laporan kinerja (Penyusunan SAKIP, RB, PPRG, SPIP)
- 3) Penyusunan laporan evaluasi (Penyusunan LKJIP, LKPJ)

Pada tahun 2025, anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 6,854,200 dan hingga Triwulan II Tahun 2025 terealisasi Rp. 2,020,000,- atau sebesar 29.47%.

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi s.d Triwulan II		Sisa
		Rp	%	
Evaluasi kinerja perangkat daerah	6,854,200	2,020,000	29,47	4,834,200

**2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

**a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Meliputi kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan bagi ASN di Bakesbangpol Kabupaten Blitar. Pada tahun 2025, anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 2,602,466,466 dan hingga Triwulan II Tahun 2025 terealisasi Rp. 1,242,921,913,- atau sebesar 47.76%.

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi s.d Triwulan II		Sisa
		Rp	%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,602,466,466	1,242,921,913	47.76	1,359,544,553

**b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**

Meliputi kegiatan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan pada Bakesbangpol Kabupaten Blitar. Pada tahun 2025, anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 26,910,000 dan hingga Triwulan II Tahun 2025 terealisasi Rp. 16,435,000,- atau sebesar 61.07%.

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi s.d Triwulan II		Sisa
		Rp	%	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26,910,000	16,435,000	61.07	10,475,000

**c. Koordinasi pelaksanaan akuntansi SKPD**

Meliputi kegiatan penyusunan CALK, KIB (A, B, C, D), prognosis 6 bulan, laporan bulanan, laporan tribulanan, laporan semesteran, dan laporan tahunan. Pada tahun 2025, anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 15,280,000 dan hingga Triwulan II Tahun 2025 terealisasi Rp. 5,642,000,- atau sebesar 36.92%.

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi s.d Triwulan II		Sisa
		Rp	%	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15,280,000	5,642,000	36.92	9,638,000

**3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

**a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**

Meliputi kegiatan penyusunan perjanjian kinerja pegawai, SKP dan DP3. Pada tahun 2025, anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 14,151,000 dan hingga Triwulan II Tahun 2025 terealisasi Rp. 3,837,500,- atau sebesar 27.12 %.

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi s.d Triwulan II		Sisa
		Rp	%	
Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	14,151,000	3,837,500	27.12	10,313,500

**b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Pada tahun 2025, anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 27,575,200 dan hingga Triwulan II Tahun 2024 terealisasi Rp. 410,000,- atau sebesar 1.49%.

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi s.d Triwulan II		Sisa
		Rp	%	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	27,575,200	410,000	1.49	27,165,200

**4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

**a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Meliputi kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pada Bakesbangpol Kabupaten Blitar. Pada tahun 2025, anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 180,334,942 dan hingga Triwulan II Tahun 2025 terealisasi Rp. 69,713,384,- atau sebesar 38.66%.

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi s.d Triwulan II		Sisa
		Rp	%	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	180,334,942	69,713,384	38.66	110,621,558

**b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Meliputi kegiatan fasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan koordinasi SKPD pada Bakesbangpol Kabupaten Blitar. Pada tahun 2025, anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 348,028,166 dan hingga Triwulan II Tahun 2025 terealisasi Rp. 209,340,250,- atau sebesar 60.15 %.

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi s.d Triwulan II		Sisa
		Rp	%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	348,028,166	209,340,250	60.15	138,687,916

**5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,** dengan sub kegiatan sebagai berikut :

**a. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Meliputi kegiatan penyediaan honor bagi tenaga administrasi dan keuangan di Bakesbangpol Kabupaten Blitar. Pada tahun 2025, anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 344,567,216 dan hingga Triwulan II Tahun 2025 terealisasi Rp. 163,355,462,- atau sebesar 47.41%.

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi s.d Triwulan II		Sisa
		Rp	%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	344,567,216	163,355,462	47.41	172.218.217

**6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,** dengan sub kegiatan sebagai berikut :

**a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

Meliputi kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas secara operasional dan administratif di Bakesbangpol Kabupaten Blitar. Pada tahun 2025, anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 42,545,000 dan hingga Triwulan II Tahun 2025 terealisasi Rp. 14,262,000,- atau sebesar 33.52 %.

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi s.d Triwulan II		Sisa
		Rp	%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Kendaraan Dinas	42,545,000	14,262,000	33.52	28,283,000

## B. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Program ini mengampu indikator kinerja utama Bakesbangpol Kabupaten Blitar dalam upaya untuk meningkatkan indeks kesalehan sosial melalui fasilitasi lembaga kesatuan bangsa. Pada tahun 2025, total anggaran pada program ini sebesar Rp. 1,482,417,999,- dan hingga Triwulan II Tahun 2025 terealisasi Rp. 288,149,000,- atau sebesar 19.44 %. Program dilaksanakan melalui 4 (lima) sub kegiatan sebagai berikut :

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi s.d Triwulan II		Sisa
		Rp	%	
1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	460,221,400	104,554,000	22.72	355,667,400
2) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	9,716,200	-	-	9,716,200
3) Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	227,161,999	146,345,000	64.42	80,816,999
4) Pembentukan Paskibraka	785,318,400	37,250,000	4.74	748,068,400

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan hingga Triwulan II Tahun 2025 pada program ini sebagai berikut :



Upacara Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2025 pada tanggal 20 Mei 2025 bertempat di Aloon-Aloon Pemkab Blitar di Kanigoro



Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 pada tanggal 1 Juni 2025 bertempat di Aloon-Aloon Pemkab Blitar



Pembinaan aktivitas Paskibraka di Akademi Militer Magelang



Seleksi Paskibraka Tahun 2025

1). *Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan :*

Pada tahun 2025, anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 460,221,400,- dan hingga Triwulan II Tahun 2025 terealisasi Rp. 104,554,000,- atau sebesar 22.72%. Sub Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran anggota/elemen masyarakat, aparatur pemerintah serta dunia pendidikan untuk mempertahankan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa, rasa nasionalisme serta sejarah perjuangan bangsa yang diwujudkan dalam kegiatan Upacara Peringatan Hari-hari Besar Nasional (PHBN) dan meningkatkan pemahaman akan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara bagi Aparatur Pemerintah dan generasi muda pelajar melalui sosialisasi pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Selain itu, sub kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan harmonisasi semangat kebangsaan sehingga tidak terjadi konflik terkait permasalahan suku, etnis dan ras di Kabupaten Blitar melalui fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), fasilitasi Kampung Pancasila, serta Fasilitasi Jejaring Panca Mandala. Output spesifik sub kegiatan ini meliputi:

- a) Pemantapan ideologi Pancasila melalui sosialisasi pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan
- b) Pendidikan Wasbang melalui Peringatan Hari Besar Nasional (Peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Peringatan Hari Kelahiran Pancasila, Rangkaian Peringatan HUT RI, Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Peringatan Hari Bela Negara);
- c) Fasilitasi kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
- d) Dukungan Kampung Pancasila bersama Kodim 0808;
- e) Fasilitasi Jejaring Panca Mandala;

2). *Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*

Pada tahun 2025, anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 9,716,200,- dan hingga Triwulan II Tahun 2025 terealisasi Rp. 0,- atau sebesar 0%. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan harmonisasi semangat kebangsaan di Kabupaten Blitar. Output spesifik sub kegiatan ini meliputi:

- a) Pelaporan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM);
- b) Pelaporan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih.

3). *Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka*

Pada tahun 2025, anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 227,161,999,- dan hingga Triwulan II Tahun 2025 terealisasi Rp. 146,345,000,- atau sebesar 64.42%. Pada tahun 2025, output spesifik sub kegiatan ini meliputi Pelaksanaan kegiatan Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan ke Akademi Militer Magelang serta rapat dan koordinasi terkait :

- a) Rekrutment Paskibraka;
- b) Pelaksanaan kegiatan Paskibraka;
- c) Pelaksanaan kegiatan Purna Paskibraka;
- d) Evaluasi pelaksanaan kegiatan Paskibraka dan Purna Paskibraka.

4). *Pembentukan Paskibraka*

Pada tahun 2025, anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 785,318,400,- dan hingga Triwulan II Tahun 2025 terealisasi Rp. 37,250,000,- atau sebesar 4.74%. Output spesifik sub kegiatan ini meliputi pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang terdiri dari Rekrutment dan Seleksi; Pemusatan pendidikan dan pelatihan serta Penguatan Paskibraka

### **C. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**

Program ini mengampu indikator utama dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui penguatan infrastruktur demokrasi. Program ini berisikan kegiatan sosialisasi Pendidikan politik, fasilitasi dan pembinaan partai politik, fasilitasi lembaga penyelenggara Pemilu serta penyaluran dana hibah bagi partai

politik yang mendapatkan kursi di DPRD. Pada tahun 2025, total anggaran pada program ini sebesar Rp. 2,246,640,000,- dan hingga Triwulan II Tahun 2025 terealisasi Rp. 2,103,046,500,- atau sebesar 93.61 %.

Program dilaksanakan melalui 2 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi s.d Triwulan II		Sisa
		Rp	%	
1) Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	132,303,600	22,526,500	17.03	109,777,100
2) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	2,114,336,400	2,080,520,000	98.40	33,816,400

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan hingga Triwulan II Tahun 2025 pada program ini sebagai berikut :



Pembahasan Ranperda Pembentukan Dana Cadangan Pilkada Tahun 2029

1). *Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah :*

Pada tahun 2025, total anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 132,303,600,- dan hingga Tribulan II Tahun 2025 terealisasi Rp. 22,526,500,- atau sebesar 17.03%.Kegiatan ini ditujukan untuk :

- Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat , bernegara dan berbangsa.
- Meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan pencapaian prestasi dalam penyelenggaraan kehidupan politik dan kenegaraan.
- Mengembangkan karakter bangsa yang selaras dengan budaya dan sejarah bangsa.
- Mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam pengelolaan bantuan keuangan Parpol yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan workshop

Keluaran kegiatan ini, sebagai berikut :

- Bagi pemilih Pemula dan perempuan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan berpolitik pemilih pemula dengan menggunakan hak pilihnya dalam rangka berpartisipasi dalam pemilu.
- Fasilitasi dan pemberdayaan partai politik
- Penyelenggaraan Pendidikan Politik akan dilaksanakan dalam bentuk:
  - ▷ Seminar dan lokakarya.
  - ▷ Sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan.
  - ▷ Asistensi, pelatihan dan bimbingan teknis.
  - ▷ Pagelaran seni dan Budaya.

Pada tahun 2025, output spesifik sub kegiatan ini meliputi :

- Pemberdayaan partai politik melalui pendidikan administrasi kelembagaan;
- Pemberdayaan partai politik melalui workshop keuangan;
- Bimtek bagi fungsionaris parpol;
- Sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula dan perempuan.

2). *Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah*

Pada tahun 2025, total anggaran pada sub ini sebesar Rp. 2,114,336,400,- dan hingga Tribulan II Tahun 2025 terealisasi Rp. 2,080,520,000,- atau sebesar 98.40%., output spesifik sub kegiatan ini meliputi :

- Fasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu;
- Memverifikasi dana bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD hasil Pemilu (hibah keuangan kepada parpol)
- Penyaluran dana hibah kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD hasil Pemilu.

#### **D. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

Program ini mengampu indikator utama dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui penguatan infrastruktur demokrasi. Program ini berisikan kegiatan fasilitasi dan pembinaan ormas serta penyaluran dana hibah kepada ormas dan/atau instansi vertikal. Pada tahun 2025, total anggaran pada program ini sebesar Rp. 3,528,270,581,- dan hingga Triwulan II Tahun 2025 terealisasi Rp. 2,625,138,000,- atau sebesar 74.40 %.

Program dilaksanakan melalui 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi s.d Triwulan II		Sisa
		Rp	%	
1) Pelaksanaan Kebijakan Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	52,512,581	-	-	52,512,581
2) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3,475,758,000	2,625,138,000	75.53	850,620,000

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan hingga Tribulan II Tahun 2025 pada program ini sebagai berikut :



Verifikasi Hibah Ormas Tahun 2026 DPC LVRI Kabupaten Blitar



Verifikasi Hibah Instansi Vertikal Tahun 2026 Polres Blitar

1) *Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*

Pada tahun 2025, total anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 52,512,58,- dan hingga Tribulan II Tahun 2025 terealisasi Rp. 0,- atau sebesar 0%. Kegiatan ini ditujukan untuk pemberdayaan dan pembinaan organisasi masyarakat guna meningkatkan pengetahuan ormas tentang keormasan dan regulasinya.

Pada tahun 2025, output spesifik sub kegiatan ini meliputi :

- Workshop administrasi bagi pengurus ormas
- Workshop keuangan ormas
- Pelatihan kelembagaan ormas

2) *Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*

Pada tahun 2024, total anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 3,475,758,000,- dan hingga Triwulan II Tahun 2024 terealisasi Rp. 2,625,138,000,- atau sebesar 75.53%. Kegiatan ini bertujuan untuk verifikasi dan monitoring ormas dan ormas asing serta verifikasi dana bantuan keuangan kepada ormas.

Pada tahun 2025, output spesifik sub kegiatan ini meliputi :

- Verifikasi ormas berupa verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan
- Hibah keuangan kepada Ormas;
- Surat rekomendasi izin ormas
- Rapat Koordinasi sengketa ormas

## **E. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA**

Program ini mengampu indikator kinerja utama Bakesbangpol Kabupaten Blitar dalam upaya meningkatkan indeks kesalehan sosial melalui fasilitasi lembaga kesatuan bangsa. Program ini berisi kegiatan fasilitasi kegiatan FKUB dan P4GN serta penghayat kepercayaan di daerah. Pada tahun 2025, anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 115,291,050,- dan hingga bulan Juni 2024 terealisasi Rp. 0,- atau sebesar 0%.

Program dilaksanakan melalui 2(dua) sub kegiatan sebagai berikut :

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi s.d Triwulan II		Sisa
		Rp	%	
1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di daerah	113,491,550	0	0	113,491,550

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi s.d Triwulan II		Sisa
		Rp	%	
2) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1,799,500	0	0	1,799,500

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan hingga Triwulan II Tahun 2024 pada program ini sebagai berikut :



Forum Komunikasi P4GN Kabupaten Blitar

1) *Pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*

Pada tahun 2025, total anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 113,491,550,- dan hingga Triwulan II Tahun 2025 terealisasi Rp. 0,- atau sebesar 0%. Output spesifik sub kegiatan ini meliputi :

- Pelaksanaan operasi gabungan narkoba
- Anjongsana (forum silaturahmi) FKUB
- Rapat koordinasi bahaya narkoba (instansi)
- Rapat koordinasi persiapan operasi gabungan narkoba

- Rapat kelembagaan FKUB
  - Rapat dukungan stabilitas dalam rangka perayaan hari besar keagamaan
  - Rakor stabilitas ekonomi sosial, budaya dan agama terutama dalam ketahanan ekonomi, kesiapsiagaan pangan, sosial, budaya dan agama
- 2) *Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*

Pada tahun 2025, total anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1,799,500,- dan hingga Tribulan II Tahun 2025 terealisasi Rp. 0,- atau sebesar 0%. Output spesifik sub kegiatan ini meliputi :

- Monitoring kegiatan penghayat kepercayaan
- Monitoring eks pengguna narkoba (bekerjasama dengan Dinkes)

#### **F. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK**

Program ini mengampu indikator kinerja utama Bakesbangpol Kabupaten Blitar dalam upaya untuk meningkatkan penanganan konflik sosial di masyarakat yang berisi kegiatan fasilitasi pencegahan dan penanganan konflik sosial di masyarakat. Pada tahun 2025, total anggaran pada program ini sebesar Rp. 1,587,893,046,- dan hingga Tribulan II Tahun 2025 terealisasi Rp. 458,260,000,- atau sebesar 28.86 %.

Program dilaksanakan melalui 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi s.d Triwulan II		Sisa
		Rp	%	
1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah.	437,448,000	225,500,000	51.55	211,948,000

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi s.d Triwulan II		Sisa
		Rp	%	
2) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	66,560,000	26,240,000	39.42	40,320,000
3) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1,083,885,046	206,520,000	19.05	877,365,046

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan hingga Triwulan II Tahun 2025 pada program ini sebagai berikut :



Monitoring aksi unjuk rasa

- 1). *Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah.*

Pada tahun 2025, total anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. – 437,448,000,- dan hingga Tribulan II Tahun 2025 terealisasi Rp. 225,500,000,- atau sebesar 51.55%, output spesifik sub kegiatan ini meliputi:

- Rapat koordinasi FKDM
- Rapat koordinasi Tim Wasdin
- Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (orang asing, ormas asing, radikalisasi)
- Operasi gabungan intelijen

- 2). *Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*

Pada tahun 2025, total anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 66,560,000,- dan hingga Tribulan II Tahun 2025 terealisasi Rp. 26,240,000,- atau sebesar 39.42%, output spesifik sub kegiatan ini meliputi :

- Pulbaket potensi konflik dan penanganan stabilitas daerah
- Operasi gabungan
- Mitigasi konflik
- Pelaporan dan evaluasi hasil pemantauan stabilitas sosial
- Monev stabilitas sosial dengan jajaran samping
- Pulbaket hasil kesepakatan pihak bertikai
- Pemantauan situasi pencegahan konflik, saat konflik, dan pasca konflik
- Pulbaket pemantauan situasi penerapan kebijakan hasil kesepakatan saat konflik

- 3). *Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota*

Pada tahun 2025, total anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1,083,885,046,- dan hingga Tribulan II Tahun 2025 terealisasi Rp. 206,520,000,- atau sebesar 19.05%, Sub kegiatan ini berisikan fasilitasi koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

## BAB III

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar merupakan program prioritas di tahun anggaran 2025 yang selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk program prioritas tersebut. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

#### 3.1 Rencana Kerja

Dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Blitar pada tahun 2025, terdapat beberapa tambahan output spesifik yang merupakan *mandatory* (wajib) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Tambahan output ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program sejalan dengan amanat nasional dan peraturan yang lebih tinggi, Adapun penambahan output kegiatan pada perubahan rencana kerja tahun 2025 sebagai berikut :

1. Gerakan pembagian bendera merah putih (Menindaklanjuti Surat dari Dirjen Polpum Kemendagri Nomor : 400.10.1.1/Polpum perihal Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih). Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih adalah program yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyemarakkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme masyarakat dengan membagikan bendera Merah Putih secara gratis.
2. Focus Grup Discussion (FGD) Forkopimda dengan unsur-unsur strategis di Kabupaten Blitar untuk meningkatkan sinergi antar unsur Forkopimda dengan pemangku kepentingan strategis daerah dalam rangka:
  - a. Deteksi dini potensi konflik sosial dan politik,
  - b. Penguatan stabilitas keamanan dan ketertiban,
  - c. Konsolidasi dukungan terhadap agenda pembangunan strategis Kabupaten Blitar tahun 2025.;

2. Peningkatan stabilitas politik pasca Pemilu melalui Tim Kewaspadaan Dini

3. Studi Pengukuran Indeks Rasa Aman Kabupaten Blitar Tahun 2025

Indeks Rasa Aman (IRA) adalah ukuran persepsi masyarakat terhadap tingkat keamanan di lingkungan tempat tinggal atau wilayah mereka. Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat merasa terlindungi dari ancaman fisik, sosial, dan ekonomi, serta kekerasan atau konflik.

4. Sarana dan prasarana yang memadai mendukung pelaksanaan tugas secara efisien, efektif, dan profesional. Untuk itu dilakukan penambahan sarana prasarana berupa printer dan upgrade jaringan internet kantor Bakesbangpol Kabupaten Blitar.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2025 difokuskan pada kegiatan :

1. Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila

Meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air melalui kegiatan pendidikan politik, sosialisasi nilai-nilai Pancasila, dan bela negara kepada masyarakat, pelajar, serta organisasi kemasyarakatan.

2. Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial serta Penguatan Ketahanan Wilayah dan Stabilitas Nasional

Meningkatkan kemampuan deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi konflik melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Tim Kewaspadaan Dini dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Selain itu kegiatan koordinasi dengan TNI, Polri, dan instansi terkait untuk menjaga ketertiban umum, memantau aktivitas orang asing, serta mendukung stabilitas daerah sebagai bagian dari stabilitas nasional.

3. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik

Melakukan pengawasan dan fasilitasi kepada organisasi masyarakat (ormas), LSM, dan partai politik, termasuk penyaluran bantuan keuangan dan pembinaan kapasitas politik masyarakat.

4. Peningkatan Ketahanan Sosial dan Budaya

Membangun ketahanan masyarakat terhadap radikalisme, intoleransi, narkoba dan pengaruh asing melalui kerja sama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, tokoh adat, dan lembaga masyarakat.

5. Reformasi Birokrasi dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan serta pelaporan kinerja, termasuk pengembangan sistem informasi dan peningkatan kapasitas SDM internal.

### 3.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk menentukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendali dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

**Tabel 3.1 Target Indikator Kinerja Utama pada Perubahan Renja Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD 2025	Realisasi		Target P-RENJA 2024	Latar Belakang Penyesuaian
			2024	Juni 2024		
1.	Indeks Kesalehan Sosial	88	84,61	-	88	-
2.	Tingkat Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat	95%	95%	45%	95%	-
3.	Tingkat Fasilitasi Penguatan Infrastruktur Demokrasi	80%	80%	40%	80%	-
4.	Nilai SAKIP	B (66,55)	B (66,55)	-	B (66,55)	-

**Tabel 3.2 Target Indikator Kinerja Program pada Perubahan Renja Tahun 2024**

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET RPJMD 2025	REALISASI		TARGET P-RKPD 2025	LATAR BELAKANG PENYESUAIAN
				2024	JUNI 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(11)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata - Rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	90%	95%	40%	90%	Sesuai dengan target RPJMD

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET RPJMD 2025	REALISASI		TARGET P-RKPD 2025	LATAR BELAKANG PENYESUAIAN
				2024	JUNI 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(11)
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan	85%	80%	35%	85%	Sesuai dengan target RPJMD
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat kehadiran masyarakat dalam dalam pemilu dan/atau pemilukada	80%	80%	40%	80%	Sesuai dengan target RPJMD
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	27%	27%	17%	27%	Target disamakan dengan tahun sebelumnya
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya yang dilaksanakan	85%	84%	0%	85%	Sesuai dengan target RPJMD
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Tingkat penanganan konflik sosial di masyarakat	95%	90%	45%	95%	Sesuai dengan target RPJMD

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau

pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan kedalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program (outcome) seharusnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Blitar namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD I dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

### **3.2 Pendanaan**

Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi beberapa hal tertentu yang telah diatur di dalam peraturan terkait, perubahan APBD tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Rencana kerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Blitar pada Tahun 2024 disajikan pada **Tabel 3.3**

**TABEL 4.1**  
**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA TAHUN 2025**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BLITAR**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025			PAGU APBD 2025 (PERGESERAN IV)	PAGU P-RENJA 2025	KETERANGAN
				OUTPUT SPESIFIK	JUMLAH	SATUAN			
1	<b>8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Rata - Rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	%	-	90	%	3,631,518,790	3,712,984,390	<b>SEKRETARIAT</b>
	<b>8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan</b>	%	-	90	%	6,854,200	9,330,000	
	<b>8.01.01.2.01.0007</b> Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	Tersedianya dokumen perencanaan, realisasi capaian kinerja dan dokumen evaluasi	3	laporan	6,854,200	9,330,000	
	<b>8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel</b>	%	-	90	%	2,644,656,466	2,670,726,466	
	<b>8.01.01.2.02.0001</b> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	org/bulan	Terbayarnya gaji dan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS (JKK, JKN, Askes)	23	org/bulan	2,602,466,466	2,602,466,466	
	<b>8.0101.2.02.0003</b> Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	Tersedianya bahan verifikasi keuangan dan pendukungnya	3	dokumen	26,910,000	43,980,000	
	<b>8.01.01.2.02.0004</b> Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	Tersedianya daftar inventaris barang, buku laporan keuangan dan CALK, prognosis dan laporan tri bulanan	3	dokumen	15,280,000	24,280,000	
	<b>8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	%	-	90	%	41,726,200	53,707,200	
	<b>8.01.01.2.05.0005</b> Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	Tersedianya SKP, DP3, dan Perjanjian Kinerja Pegawai	3	dokumen	14,151,000	24,768,000	
	<b>8.01.01.2.05.0009</b> Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	orang	27,575,200	28,939,200	
	<b>8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel</b>	%	-	90	%	551,169,708	609,557,468	
	<b>8.01.01.2.06.0002</b> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	Tersedianya peralatan kantor, perlengkapan kantor, perlengkapan mobilitas, peralatan komputer	5	paket	203,141,542	269,373,184	
	<b>8.01.01.2.06.0009</b> Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11	laporan	348,028,166	340,184,284	
	<b>8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu</b>	%	-	90	%	344,567,216	296,173,256	
	<b>8.01.01.2.08.0004</b> Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	10	laporan	344,567,216	296,173,256	
	<b>8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik</b>	%	-	90	%	42,545,000	73,490,000	
	<b>8.01.01.2.09.0001</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	Pemeliharaan kendaraan dinas secara administratif dan operasional (6 mobil, 1 pick up, dan 22 sepeda motor)	29	Unit	42,545,000	73,490,000	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025			PAGU APBD 2025 (PERGESERAN IV)	PAGU P-RENJA 2025	KETERANGAN
				OUTPUT SPESIFIK	JUMLAH	SATUAN			
2	<b>8.01.02</b> <b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Persentase Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan</b>	%	-	85	%	1,482,417,999	1,532,417,999	BIDANG IDEOLOGI
	<b>8.01.02.2.01</b> <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>1) Persentase kebijakan teknis yang dihasilkan</b> <b>2) Persentase kegiatan pemantapan ideologi Pancasila dan karakter bangsa yang dilaksanakan</b>	%	-	85	%	1,482,417,999	1,532,417,999	
	<b>8.01.02.2.01.0003</b> Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	1. Persiapan bahan pelaksanaan kegiatan, rencana kerja dan pendistribusian pekerjaan kegiatan (25 orang) 2. Pemantapan Ideologi Pancasila melalui sosialisasi pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (eks napiter, siswa SMA/SMK, masyarakat, ormas) (50 orang) 3. Pendidikan Wasbang melalui PHBN (300 orang) 4. Fasilitasi Kampung Pancasila (25 orang) - Nota Kesepakatan BPIP dan Pemkab Blitar NOMOR : B/130/11/409.1.1/NK/2021 5. Fasilitasi Jejaring Panca Mandala (25 orang) - Nota Kesepakatan BPIP dan Pemkab Blitar NOMOR : B/130/11/409.1.1/NK/2021 6. Forum Silaturahmi FPK (25 orang)	450	Orang	460,221,400	492,321,400	
	<b>8.01.02.2.01.0005</b> Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	1. Persiapan bahan pelaksanaan kegiatan, rencana kerja dan pendistribusian pekerjaan kegiatan (1 dok) 2. Pelaporan GNRN (2 dok) - SK Bupati Blitar Nomor : 188/134/409.06/KPS/2020 3. Dokumen pelaporan pembagian bendera (1 dok) - Surat dari Dirjen Polpum Kemendagri Nomor : 400.10.1.1/Polpum perihal Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih, Surat dari Sekda Kab. Blitar Nomor : B/200.01.02.01/2104/409.1/2023 perihal Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih	4	Laporan	9,716,200	59,481,400	
	<b>8.01.02.2.01.0007</b> Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	dokumen	Rapat dan koordinasi 1. Recruitment (1 dok) 2. Pelaksanaan kegiatan (1 dok) 3. Purna Paskibraka (1 dok) 4. Evaluasi (1 dok)	4	dok	227,161,999	227,161,999	
	<b>8.01.02.2.01.0008</b> Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	orang	Pasukan Paskibraka Kabupaten (72 orang) - PP Nomor 58 Tahun 2022	78	orang	785,318,400	753,453,200	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025			PAGU APBD 2025 (PERGESERAN IV)	PAGU P-RENJA 2025	KETERANGAN
				OUTPUT SPESIFIK	JUMLAH	SATUAN			
3	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1) Tingkat kehadiran masyarakat dalam pemilu dan/atau pilukada; 2) Presentase kegiatan peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik yang dilaksanakan	%	-	80	%	2,246,640,000	2,246,640,000	BIDANG POLDAGRI
	8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik	%	-	80	%	2,246,640,000	2,246,640,000	
	8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	1. Persiapan bahan pelaksanaan kegiatan, rencana kerja dan pendistribusian pekerjaan kegiatan (25 orang) 2. Pembedayaan partai politik melalui workshop keuangan (50 orang) 3. Bimtek bagi fungsionaris parpol (50 orang) 4. Pendidikan politik bagi pemilih pemula dan perempuan (100 orang) 5. Forum Komunikasi Cipta Stabilitas Politik Paska Pemilu Serentak (50 orang)	275	Orang	132,303,600	132,303,600	
	8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	1. Persiapan bahan pelaksanaan kegiatan, rencana kerja dan pendistribusian pekerjaan kegiatan (1 lap) 2. Fasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan lembaga penyelenggara Pemilu (3 lap) 3. Hibah Keuangan kepada parpol (3 lap = administrasi, verifikasi lapangan, money)	8	Laporan	2,114,336,400	2,114,336,400	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025			PAGU APBD 2025 (PERGESERAN IV)	PAGU P-RENJA 2025	KETERANGAN
				OUTPUT SPESIFIK	JUMLAH	SATUAN			
4	<b>8.01.04</b> <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Persentase organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi</b>	%	-	27	%	3,528,270,581	3,528,270,581	<b>BIDANG KETAHANAN EKOSOSBUDGAM DAN ORMAS</b>
	<b>8.01.04.2.01</b> <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Persentase ormas yang dibina (Jumlah ormas yang dibina dibagi jumlah ormas yang ada x 100%)</b>	%	-	27	%	3,528,270,581	3,528,270,581	
	<b>8.01.04.2.01.0003</b> Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	1. Persiapan bahan pelaksanaan kegiatan, rencana kerja dan pendistribusian pekerjaan kegiatan (25 orang) 2. workshop keuangan bagi pengurus ormas (10 orang) 3. pelatihan administrasi bagi pengurus ormas (10 orang) 4. pelatihan kelembagaan ormas (20 orang) 5. Forum komunikasi ormas dalam rangka cipta kondisi sukses Pemilu serentak tahun 2024 (50 orang)	115	Orang	52,512,581	52,512,581	
	<b>8.01.04.2.01.0005</b> Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	1. Persiapan bahan pelaksanaan kegiatan, rencana kerja dan pendistribusian pekerjaan kegiatan (1 lap) 2. verifikasi ormas berupa verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan (2 lap) 3. Hibah Keuangan kepada ormas (3 lap = administrasi, verifikasi lapangan, monev) 4. Surat rekomendasi izin ormas (2 lap) 5. Rapat koordinasi sengketa ormas (2 lap)	10	Laporan	3,475,758,000	3,475,758,000	
5	<b>8.01.05</b> <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>Persentase Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya yang dilaksanakan</b>	%	-	85	%	115,291,050	115,291,050	
	<b>8.01.05.2.01</b> <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dihasilkan</b>	%	-	85	%	115,291,050	115,291,050	
	<b>8.01.05.2.01.0004</b> Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	1. Persiapan bahan pelaksanaan kegiatan, rencana kerja dan pendistribusian pekerjaan kegiatan (25 orang) 2. Rapat koordinasi bahaya narkoba (instansi) (50 orang) 2. Rapat koordinasi persiapan operasi gabungan narkoba (50 orang) 3. Rapat kelembagaan FKUB (50 orang) 4. Rapat dukungan stabilitas dalam rangka perayaan hari besar keagamaan (25 orang) 5. Rakor stabilitas ekonomi sosial, budaya dan agama terutama dalam ketahanan ekonomi, kesiapsiagaan pangan, sosial, budaya dan agama (25 orang)	225	Orang	113,491,550	113,491,550	
	<b>8.01.05.2.01.0005</b> Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	1. Persiapan bahan pelaksanaan kegiatan, rencana kerja dan pendistribusian pekerjaan kegiatan (1 lap) 2. Monitoring kegiatan penghayat kepercayaan (1 lap) 3. Monitoring eks pengguna narkoba (bekerjasama dengan Dinkes) (1 lap)	3	Laporan	1,799,500	1,799,500	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025			PAGU APBD 2025 (PERGESERAN IV)	PAGU P-RENJA 2025	KETERANGAN
				OUTPUT SPESIFIK	JUMLAH	SATUAN			
6	<b>8.01.06</b> <b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Tingkat penanganan konflik sosial di masyarakat</b>	%	-	95	%	1,587,893,046	2,026,393,046	<b>BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK</b>
	<b>8.01.06.2.01</b> <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Persentase kegiatan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	%	-	95	%	1,587,893,046	2,026,393,046	
	<b>8.01.06.2.01.0004</b> Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	1.Persiapan bahan pelaksanaan kegiatan, rencana kerja dan pendistribusian pekerjaan kegiatan (25 orang) 2. Rapat koordinasi FKDM (50 orang) 3. Rapat koordinasi Tim Wasdin (115 orang) 4. Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (orang asing, ormas asing, radikalisasi) (50 orang) 5. Operasi gabungan intelijen (10 orang)	250	Orang	437,448,000	525,948,000	
	<b>8.01.06.2.01.0005</b> Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	1.Persiapan bahan pelaksanaan kegiatan, rencana kerja dan pendistribusian pekerjaan kegiatan (1 lap) 2. Pulbaket potensi konflik dan penanganan stabilitas daerah 4. Mitigasi konflik 5. Pelaporan dan evaluasi hasil pemantauan stabilitas sosial 6. Monev stabilitas sosial dengan jajarang samping 7. Pemantaan situasi pencegahan konflik, saat konflik, dan pasca konflik 8. Pulbaket pemantauan situasi penerapan kebijakan hasil kesepakatan saat konflik (pemantauan agar saat salah satu pihak bertikai tidak melakukan wan prestasi) 9. Indeks Rasa Aman	9	Laporan	66,560,000	216,560,000	
	<b>8.01.06.2.01.0006</b> Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1.Persiapan bahan pelaksanaan kegiatan, rencana kerja dan pendistribusian pekerjaan kegiatan (1 dok) 2. Koordinasi Forkopimda ( 4 dok)	5	Dokumen	1,083,885,046	1,283,885,046	
<b>Total</b>							<b>12,592,031,466</b>	<b>13,161,997,066</b>	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar merupakan suatu proses perencanaan tahunan yang hendak dilaksanakan yang mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Kepmendagri No. 050 – 3708 Tahun 2020, Kepmendagri Nomor 050 - 3389 Tahun 2021, RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021 - 2026, Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar Tahun 2021 -2026 dan disesuaikan pula dengan kemampuan dukungan sumber daya dan dukungan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Blitar.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Rencana Kerja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta vahan evaluasi dan feeback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan organisasi. Dengan harapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Tahun 2025 ini dapat terealisasi dan dapat dilaksanakan dengan baik untuk mengemban visi dan misi yang ditetapkan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Hal-hal yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD.
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis

Demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Tahun 2025 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar disusun serta dapat bermanfaat dan berguna untuk kepentingan pembangunan Kabupaten Blitar pada tahun 2025 yang akan dicapai nantinya.

Blitar, 10 Juli 2025  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BLITAR

Ir. SETIYANA, MM.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196808101997031003

Demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Tahun 2025 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar disusun serta dapat bermanfaat dan berguna untuk kepentingan pembangunan Kabupaten Blitar pada tahun 2025 yang akan dicapai nantinya.

Blitar, 10 Juli 2025  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BLITAR



Ir. SETIYANA, MM.  
Bl Pembina Utama Muda  
NIP. 196808101997031003